

# **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

**(Studi Kasus pada Pemerintahan kabupaten merauke).**

Nama:Ludiana W Kinamde

NPM:201462201111

## **ABSTRAK**

Ludiana W Kinamde, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah”.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji “pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya jenis pengguna informasi untuk laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan semua jenis pengguna.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten merauke. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 30 responden yang merupakan pengguna internal dan eksternal informasi keuangan daerah. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi masing-masing 0,005 dan 0,000. Namun pemahaman laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,082. Sedangkan secara simultan aksesibilitas, penyajian laporan keuangan daerah dan pemahaman laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci : pengaruh penyajian laporan keuangan, daerah laporan keuangan, dan penggunaan informasi keuangan daerah.

## **ABSTRACT**

**Ludiana W Kinamde** *“The Effect Of Regional Financial Statement Presentation And Financial Statement Accessibility On The Use Of Regional Financial Information”*.

*The purposes of this study were to examine “the effect of accessibility, the local financial report presentation, understanding local financial report to the use of local financial information”. The background of this study is the number of information user types into the financial report. Therefore, it is quite hard to prepare the information which is satisfying all of the local financial information users.*

*The data of this study was the primary data. The population of the study was SKPD in the Provincial Government of Rembang city. The data was collected from 30 respondents who were internal and external users of the local financial information. The hypothesis of this study was examined by using the multiple linear regression method.*

*The results of this study showed that partially, accessibility, to the local financial report presentation affects to the use of local financial information with the respective significance values 0.005 and 0,000. However, understanding local financial reports no signs of the use of local financial information with the respective significance values 0.082. Meanwhile, simultaneously accessibility, the local financial report presentation, understanding of local financial report to the use of local financial information with a significance value of 0.000.*

**Keyword :** *local financial reports, accessibility, local financial information*

### **A. Latar Belakang**

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah daerah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, Mulyana, (2006) dalam Bandariy, (2011). Akuntabilitas

adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011). Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, Mardiasmo, (2002) dalam Bandariy (2011). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalam Rohman (2009). Pernyataan tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2007, opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat.

Alasan masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 2008) Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond, (2002) dalam Aliyah dan Anhar (2012) dalam Bandariy (2011), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka

panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian pelaporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitiannya adalah penyajian pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

## **. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
3. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari pentingnya laporan keuangan daerah sebagai alat untuk mengawasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dan menilai kinerja keuangan pemerintah secara lebih baik.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah kabupaten merauke.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengolahan laporan keuangan daerah kabupaten merauke

### **Laporan Keuangan Daerah**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah, sekarang ini pada setiap daerah dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. Sedangkan untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah menurut (Indra Bastian) (2010:138) (PSAP) No. 01, alinea 14, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional

- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari pelaporan keuangan ini berdasarkan ketetapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, alinea 9, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ) di nyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Berdasarkan hasil yang di atas laporan keuangan daerah kabupaten merauke adalah untuk menginformasikan laporan keuangan daerah kabupaten merauke setiap laporan keuangan memiliki hubungan yang berkait sehingga informasi yang di laporkan ke perinta daerah yang menyediakan informasi keuangan daerah kabupaten merauke.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos pos berikut : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Dari pendapatan diatas dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan daerah adalah mengajikan informasi mengenai posis keuangan yang dimiliki seperti laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran yang menyediakan informasi keuangan daerah kabupaten merauke.

## **2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Ada beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Permerintahan (PSAP) No. 1 alinea 36 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

- c. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Bandaiy 2011).

Berdasarkan hasil yang di atas informasih yang di peroleh dari laporan keuang tersebut di anggap bentuk keterbatasan informasi dari laporan keuangan tersebut pemerintah daerah kabupaten merauke.

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajemen internal pemda terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan akses yang diberikan oleh pemerinta daerah kabupaten merauke.

### **3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut (Governmental accounting Standard Board) (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik.

Dari pendapat diatas dapat di pahami,laporan keuangan daerah yang di laporkan secara keseluruhan yang di informasikan selama 1 periode pelaporan keuangan yang di banding kan dengan anggaran yang telah di tetapkan pemerintah daerah kabupaten merauke sehingga pengajian laporan keuangan daerah di susun untuk menyediakan informasi laporan keuangan daerah kabupaten merauke.



- a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
- b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### 1) Relevan

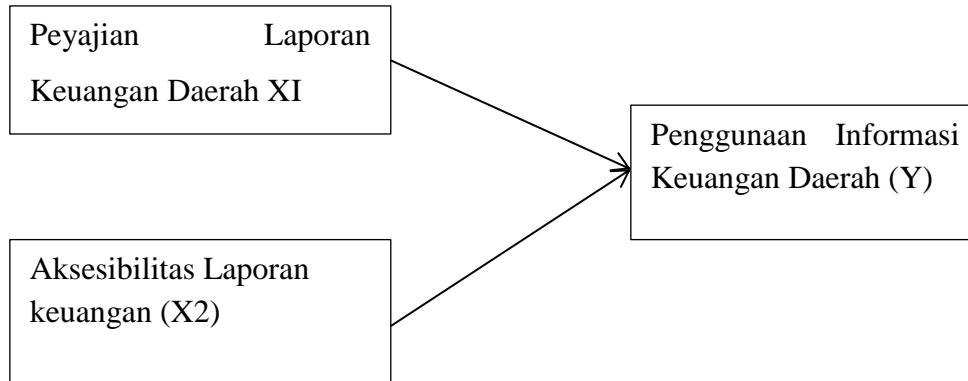
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

#### 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### C. Kerangka Berpikir

Adapun gambar kerangka piker dala penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

### D. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat di pahami (PP No. 71 Tahun 2010 ) dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002 dalam Rohman 2009). Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis.

Menurut Bandariy (2011) Laporan keuangan pemerintah bermanfaat untuk menilai akuntabilitas. Melalui penyajian laporan keuangan para pengguna dapat melihat bagaimana pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menjadi akuntabel secara publik. Di samping untuk tujuan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah. memuat informasi akuntansi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan, terutama dalam melakukan alokasi sumber daya. Para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kemampuan atau sumberdaya dapat menyandarkan informasi keuangan pada laporan keuangan. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Secara lebih spesifik (standar akuntansi pemerintah) SAP menjelaskan lebih jauh lagi mengenai laporan keuangan pemerintah juga menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan selama periode pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten merauke.

## **2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam Rohman, 2009). mengatakan bahwasanya hasil dari penelitian tersebut yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini dapat di tempatkan penelitian dan waktu penelitian adalah:

#### **1. Tempat Penelitian**

Yang menjadi tempat penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

#### **2. Waktu penelitian**

Adapun waktu Penelitian sejak Bulan Februari- Maret 2022

### **B. Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini ada independen dengan pendekatan penelitian. Penelitian independen adalah penelitian yang digunakan berupa studi lapangan menelusuri data

yang dikumpulkan adalah berupa gambar, rekaman, dan catatan yang akan digunakan sebagai literatur penentuan untuk merumuskan masalah penelitian.

Peneliti menggunakan metode independen agar dapat mendalami sejauh mana Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

### **C. Populasi dan sampel**

Populasi Dan sampel Dalam Penelitian ini adalah laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah serta Kepala Dinas, Sekertaris, dan Ka. Sub bagian Keuangan yang objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang di perlukan untuk pengambilan keputusan, jenis data dapat di bedakan menjadi dua jenis data independen dan data responden. Penelitian ini menggunakan kedua jenis data yang telah dikemukakan di atas yaitu data independen dan responden.

Data independen dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profit dan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, sedangkan data independen berupa data yang di sajikan dalam bentuk laporan keuangan Daerah yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah

##### **a. Data primer**

Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantar. Dalam hal ini data primer didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara secara langsung ditempat penelitian.

##### **b. Data sekunder.**

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (sugiyono 2010). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum objek penelitian
2. Mengadakan wawancara dengan Kepala Dinas, Sekertaris dan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Merauke.
3. Mempelajari Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.
4. Mempelajari aktivitas dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

#### **F. efinisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

1. Penyajian laporan keuangan daerah (Variabel Independen).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan daerah diukur menggunakan instrumen kuesioner yang menggunakan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

2. Aksesibilitas laporan keuanga

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner yang menggunakan indikator yaitu data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. (UU No.33 Tahun 2004).

3. Penggunaan informasi keuangan daerah

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan ini adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009).

#### **G. Analisis Regresi Berganda**

Metode Analisis Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variable independen (Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan, dengan variable dependen (Penggunaan Informasi Keuangan Daerah). Untuk menguji hipotesis diatas, digunakan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi

$X_1$  = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

$X_2$  = Aksesibilitas laporan keuangan

$Y$  = Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

$E$  = Standar Error

## H. Pengujian Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal

### 2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel  $x$  tidak saling berkorelasi linear

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

### 4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi, misalnya perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dengan kata lain, heterokedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varians yang konstan (Pratisto 2004:149 dalam Ranti Oktari 2011).

## I. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji  $t$ . Uji  $t$  digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh

terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini adalah Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi. Hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini adalah Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi.

#### J. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Pada penelitian ini jumlah koesioner yang di sebar sebanyak 30 koesioner yang dilakukan dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 10 Mei dan koesioner yang kembali sebanyak 30 koesioner artinya persentase tingkat pengembalian koesioner 100%.

Langkah penyebaran Koesioner dilakukan selama 1 minggu dengan memberikan secara langsung kepada ke kabinang keuangan, dan bidang keuangan membantu untuk di sebar koesionernya.

Kemudian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, koesioner diambil kembali. Pengembalian koesioner dilakukan dua kali, sebab saat pertama pengambilan masih ada yang belum selesai dalam pengisian koesionernya. Berikut adalah ringkasan pengiriman dan pengambilan koesioner.

#### Ringkasan Pengiriman dan Pengambilan Koesioner.

Koesioner	Jumlah	Persentase (%)
Koesioner yang dibagi	30	100 %
Koesioner yang tidak kembali	0	0
Koesioner yang tidak diolah	0	0

Koesioner yang dapat diolah	30	100%
-----------------------------	----	------

#### D. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasi antara variabel independennya rendah. Keberadaan multikolinearitas dideteksi dengan *Varians Inflating Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Hasil uji multikolinearitas tersaji pada tabel berikut ini

#### E. Uji Multikolinearitas

##### Coefficients

Model	Collienarity Statistik	
	Tolerance	Vip
Penyajian Laporan Keuangan	796	1.256
Aksebilitas Laporan keuangan	796	1.257

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

#### F. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas

#### G. Hasil Uji Penelitian



Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) dapat menjelaskan variabel penggunaan informasi keuangan daerah (Y).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.237 <sup>a</sup>	.056	-.014	4.27766

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25 2022

### H. Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga publik bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik Mardiasmo (2004: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa memberikan informasi yang baik

dan benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan teori sinyal. Dalam teori keagenan dibahas tentang masalah keseimbangan informasi atau dikenal dengan *assimetri information*. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyajian dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. Pihak penyajian harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal juga dibahas tentang pemberian sinyal berupa informasi-informasi yang bersal dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah**

Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan tersebut. Dalam hal ini akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya *website*. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Berdasarkan hasil temuan empiris, bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bandary (2011), Saputra (2012), dan Ramadhani (2014)
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bandary (2011), dan Ramadhani (2014)

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel penelitian yaitu dengan mengambil sampel dari SKPD sebagai penyaji laporan keuangan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan antara pengguna internal dengan pengguna eksternal laporan keuangan
2. Peneliti yang akan datang agar memperluas variabel yang diteliti, selain variabel yang diteliti sekarang
3. Peneliti yang akan datang juga dapat menggunakan metode interview selain dengan kusioner untuk mendapatkan data yang lebih kredibel

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bandary,Himmah, 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). *proposal*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali,Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Tegal: Penerbit Universitas Diponegoro*
- Kawedar,Warsito. Rohman, dan Sri Handayani. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Semarang: Universitas Diponegoro.*

- Mardiasmo,(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Akuntansi Pemerintah, Vol.2, No.11, pp. 1-17.*
- Mulyana, Budi, (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, pp, 65-78.*
- Rohman, Abdul (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal MAKSI. Vol.7 NO.2. Hal. 105-220. Agustus 2007.*
- Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). proposal. Universitas Negeri Padang.